



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	10 (Sepuluh)
Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan : 1. Asosiasi Apotek Indonesia (ASAPIN) 2. Gabungan Pengusaha Farmasi (GP FARMASI)
Hari, Tanggal	:	Rabu, 2 Februari 2022
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Gde Sumarjaya Linggih., S.E., M.A.P, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Mendapatkan Masukan terhadap ketersediaan obat-obatan dalam rangka mengantisipasi Covid-19 varian Omicron.
Hadir	:	1. 30 orang dari 53 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. a. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Farmasi, Bapak Tirto Kusnadi; b. Sekjen Asosiasi Apotek Indonesia, Bapak Lilik Yusuf Indrajaya; beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Asosiasi Apotek Indonesia (ASAPIN) dan Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi) pada pukul 10.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Asosiasi Apotek Indonesia (ASAPIN) dan Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi) pada hari Selasa, 2 Februari 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih., S.E., M.A.P

II. CATATAN RAPAT

Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan aspirasi dari Asosiasi Apotek Indonesia dan Gabungan Pengusaha Farmasi mengenai Ketersediaan Obat-Obatan dalam rangka mengantisipasi Covid 19 Varian Omicron dan akan menyampaikan penjelasan tersebut kepada mitra terkait melalui Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Investasi, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

CATATAN

Komisi VI DPR RI mencatat beberapa permasalahan sebagai berikut untuk didiskusikan lebih lanjut dengan Pemerintah:

1. Anggota Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia adalah asset bangsa yang memproduksi 90% volume obat di Indonesia, yang harus diajak kolaborasi oleh Pemerintah dalam pengadaan obat yang cukup dan tepat pilihan.
2. Semua obat Covid19
 - Kasus ringan s/d sedang: Anggota Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia sudah mencapai kemandirian
 - Kasus berat : Anggota Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia sudah produksi sebagian besar item produk.
3. Perlu kolaborasi semua pihak terkait untuk memastikan jenis obat Covid19 yang akan digunakan di Indonesia. Sulit untuk mengikuti obat paten yang diajurkan oleh WHO yang kemudian menjadi monopoli perusahaan farmasi asing.
4. Kapasitas industri farmasi nasional berlebih dan sangat sanggup untuk kemandirian obat nasional. Industri farmasi di Indonesia adalah yang terbaik di ASEAN.
5. Besarnya nilai investasi untuk mencapai kemandirian obat membuat semua pihak harus suportif, adaptif, dan kolaboratif untuk menjamin digunakannya produk produksi dalam negeri
6. Situasi yang kompleks dan dinamis memerlukan sikap positif-kolaboratif dari semua pihak dan tidak saling menyalahkan.

7. Rekomendasi dari Asosiasi Apotek Indonesia dalam rangka pelayanan obat-obatan Omicron, sangat dibutuhkan suplai yang konsisten untuk menjamin ketersediaan obat tersebut. Golongan obat yang biasanya dibutuhkan adalah:
 - a. Obat Anti Viral
 - b. Kortikosteroid
 - c. Obat Flu
 - d. Vitamin D3 1000
 - e. Vit C 1000
 - f. Ekspektoran
8. Asosiasi Apotek Indonesia meminta adanya pemantauan ketersediaan obat secara digital dan telefarmasi untuk mengakomodasi kebutuhan pasien Covid 19.
9. Peran Apotek menjadi sangat penting dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 terutama karena apotek menjalankan pelayanan kefarmasian adanya apoteker yang menjamin kebenaran obat-obatan diberikan kepada masyarakat. GP Farmasi dan Asosiasi Apotek Indonesia menyampaikan aspirasi kepada Komisi VI untuk menyampaikan masalah peraturan perizinan usaha OSS RBA (Risk Based Approach).
10. Mengingat penyebaran dan mutasi Covid-19 sangat cepat dan kebutuhan akan obat-obat impor yang mendesak serta mencegah permainan di jalur distribusi dan penjualan, Komisi VI DPR RI mendukung upaya peningkatan peran GP Farmasi dan Asosiasi Apotek dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia, serta dilibatkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah terkait Covid-19.
11. Komisi VI mendukung penerapan Formularium Nasional untuk ketersediaan dan penggunaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, terjangkau dan berbasis bukti ilmiah dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang memberikan penguatan kepada Industri Farmasi Nasional.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.04 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,



Gde SUMARJAYA LINGGIH., S.E, M.A.P.
A-327